

**STRATEGI MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN MERAUKE, PROVINSI PAPUA SELATAN**

Sovia Maria Zenka

NPP. 32.1084

*Asdaf Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan*

*Program Studi Keuangan Publik*

Email: [32.1084@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.1084@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Ir. Hj. Dedeh Maryani, MM

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *Although the Government of Merauke Regency has consistently received an Unqualified Opinion on its Regional Government Financial Reports for nine consecutive years, various weaknesses persist in the Internal Control System and compliance with laws and regulations, including budgeting errors, non-compliant official travel, and suboptimal asset management. This discrepancy raises concerns about the effectiveness of the strategies implemented by the Regional Financial and Asset Management Agency in responding to audit findings and sustaining the WTP opinion. Therefore, a strategic assessment is necessary to formulate appropriate measures that enhance accountability and transparency in regional financial management to ensure the continued achievement of the WTP opinion.* **Purpose:** *This study is to formulate strategic recommendations for the Regional Financial and Asset Management Agency of Merauke Regency in responding to the audit findings of the Audit Board of Indonesia in order to maintain the Unqualified Opinion on the Regional Government Financial Reports.* **Method:** *This study employs a descriptive qualitative method, utilizing a SWOT analysis approach to identify internal and external strategic factors, followed by the application of the Litmus Test to assess the feasibility, relevance, and effectiveness of the proposed strategies.* **Result:** *The results of the study indicate that BPKAD has demonstrated strengths in implementing Government Accounting Standards and maintaining a sound internal control system. However, weaknesses remain in the follow-up of BPK audit findings and in the delayed submission of financial reports from district-level offices.* **Conclusion:** *Based on the SWOT analysis and Litmus Test, the study recommends strategies such as strengthening internal control mechanisms, enhancing human resource capacity, and developing an integrated communication platform. These strategies are expected to improve transparency and accountability in financial management and support the continued achievement of the Unqualified Opinion.*

**Keyword:** *Strategy, SWOT, Litmus Test, LKPD, WTP*

## ABSTRAK

**Pernyataan Masalah/Latar Belakang (GAP):** Meskipun Pemerintah Kabupaten Merauke telah secara konsisten menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama sembilan tahun berturut-turut, masih terdapat berbagai kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, seperti kesalahan penganggaran, perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan, dan pengelolaan aset yang suboptimal. Kesenjangan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas strategi yang diterapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam menanggapi temuan audit dan mempertahankan opini WTP. Oleh karena itu, diperlukan penilaian strategis untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah agar pencapaian opini WTP dapat berlanjut. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi strategi bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke dalam menindaklanjuti temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis internal dan eksternal, yang kemudian dilanjutkan dengan penerapan *Litmus Test* untuk menilai kelayakan, relevansi, dan efektivitas strategi yang diusulkan. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKAD telah menunjukkan kekuatan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan menjaga sistem pengendalian internal yang baik. Namun, masih terdapat kelemahan dalam tindak lanjut temuan audit BPK dan keterlambatan pengiriman laporan keuangan dari kantor-kantor tingkat distrik. **Kesimpulan:** Berdasarkan analisis SWOT dan *Litmus Test*, penelitian ini merekomendasikan strategi seperti penguatan mekanisme pengendalian internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan platform komunikasi terintegrasi. Strategi-strategi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Strategi, SWOT, *Litmus Test*, LKPD, WTP

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintahan Indonesia mengalami perubahan besar setelah periode Reformasi dengan penerapan sistem desentralisasi, yang memberikan otonomi yang lebih luas bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pratiwi et al., 2021). Dalam hal ini, Pemerintah Daerah wajib mengelola keuangan secara terbuka dan akuntabel, salah satunya melalui penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Jung, 2024). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah bersama DPRD mengelola daerah berdasarkan prinsip otonomi, dengan tujuan meningkatkan pengelolaan sumber daya

daerah dan memperbaiki akuntabilitas terhadap Masyarakat (Tanjung et al., 2021). Tujuan sistem ini adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga setiap daerah wajib menyusun dan menyajikan LKPD untuk pertanggungjawaban penggunaan APBD. LKPD yang disusun oleh setiap pemerintah daerah, harus mencerminkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sumaryana et al., 2025). Sebagai lembaga tertinggi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara secara transparan dan akuntabel (Akbar, 2013). Opini merupakan pernyataan yang diberikan oleh BPK terhadap LKPD mengenai kewajaran penyajian informasi keuangan dengan didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan Pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern (Sinurat, 2015). Pemberian opini pada laporan keuangan oleh BPK ada 4 klasifikasi antara lain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) (Suwanda, 2013). Kabupaten Merauke telah berhasil mendapatkan opini WTP selama sembilan tahun berturut-turut, yang mencakup tahun 2019 hingga 2023. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. pemberian Opini WTP.

Namun, meskipun memperoleh opini WTP, terdapat sejumlah temuan dalam hasil pemeriksaan BPK terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah, terutama dalam hal pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2023, ditemukan beberapa kelemahan, antara lain kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa pada tujuh SKPD sebesar Rp5.760.614.850,00, belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp930.471.578,00, serta pengelolaan aset yang tidak memadai, seperti 7 bidang tanah yang belum disertifikasi dan 21 kendaraan dinas yang digunakan oleh pihak tidak berhak. Temuan-temuan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan pengelolaan keuangan yang perlu segera diperbaiki agar Kabupaten Merauke dapat mempertahankan opini WTP dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Meskipun Kabupaten Merauke berhasil mempertahankan opini WTP selama sembilan tahun berturut-turut, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya sejumlah kelemahan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dapat mengancam keberlanjutan pencapaian tersebut. Salah satu kesenjangan utama terletak pada implementasi sistem pengendalian internal (SPI) yang masih kurang optimal, serta ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Temuan BPK pada LKPD Kabupaten Merauke tahun 2023 mencatat adanya kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa pada tujuh SKPD yang mencapai Rp5.760.614.850,00, serta belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp930.471.578,00. Selain itu, terdapat juga

kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp3.315.565.000,00 yang belum ditindaklanjuti oleh SKPD terkait. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun laporan keuangan telah disajikan dengan baik, implementasi pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan aset daerah masih belum maksimal.

Selain itu, pengelolaan aset daerah juga menunjukkan kelemahan yang signifikan. Temuan BPK mengungkapkan bahwa sejumlah aset daerah, seperti tanah dan kendaraan dinas, belum dikelola dengan baik dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuh bidang tanah yang belum disertifikasi, 21 kendaraan dinas yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak, serta rumah dinas yang ditempati oleh pihak yang tidak berhak mencerminkan adanya kesenjangan dalam pengelolaan aset yang berpotensi merugikan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrua, pengelolaan aset tetap harus dilaksanakan dengan akurat dan transparan. Namun, temuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset di Kabupaten Merauke belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan, yang dapat berdampak pada penurunan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Eriza yang mengkaji peran Inspektorat dalam mempertahankan opini WTP dengan pendekatan analisis SWOT dan uji litmus. Temuan tersebut memberikan gambaran awal bagi peneliti dalam menyusun strategi serupa di daerah berbeda untuk memperkaya referensi ilmiah terkait upaya mempertahankan opini WTP (Venaya, 2023). Kemudian, penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Budiyan dkk, memberikan perspektif yang relevan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, seperti pemahan akuntansi, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi, yang juga menjadi dasar pentingnya dalam upaya mempertahankan opini WTP (Budiyan et al., 2024). Penelitian penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Novita dkk juga membahas secara langsung tentang strategi pengelolaan keuangan yang berhasil membawa Kota Sukabumi meraih opini WTP secara berturut-turut, yang relevan dengan fokus penelitian peneliti mengenai strategi mempertahankan opini WTP di BPKAD Kabupaten Merauke, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk mengidentifikasi strategi yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah (Ningsih et al., 2022). Penelitian keempat yang dilakukan oleh Baijong Lin dkk, memberikan pemahaman tentang bagaimana strategi yang telah peneliti rumuskan dalam analisis swot kemudian diuji secara nyata dan bagaimana fleksibilitas serta pendekatan dinamis dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam menghadapi tantangan organisasi yang kompleks (Lin et al., 2021). Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Al Fazri menemukan bahwa strategi mempertahankan opini WTP yang dilakukan dengan memperkuat pemahaman landasan legalistik kebijakan akuntansi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, meningkatkan sarana dan prasarana, serta pelatihan akuntansi bagi pegawai

dalam upaya menindaklanjuti atas temuan pada laporan keuangan pemerintah daerah dengan bimbingan dari BPK (Fazri, 2023).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang terletak pada fokus dan pendekatannya yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, di mana penelitian ini secara khusus mengkaji strategi BPKAD Kabupaten Merauke dalam mempertahankan opini WTP dengan mengintegrasikan analisis SWOT dan matriks IFAS-EFAS untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal secara menyeluruh, serta merumuskan strategi yang kontekstual dan aplikatif sesuai dengan karakteristik unik wilayah perbatasan dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh pemerintah daerah; hal ini membedakannya dari penelitian terdahulu yang lebih menekankan pada peran inspektorat, faktor teknis laporan keuangan, atau studi kasus di daerah lain, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang lebih mendalam dalam pengembangan strategi keuangan daerah berbasis analisis strategis yang komprehensif dan adaptif.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi strategi bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke dalam menindaklanjuti temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfungsi untuk mengembangkan teori selama proses pengumpulan data (Sugiyono, 2018), dengan pendekatan deskriptif induktif yang berupaya menggambarkan fenomena yang diamati secara rinci (Wasistiono et al., 2024). Data yang digunakan antara lain data primer dan data sekunder dengan menentukan informan menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability sampling yaitu purposive sampling dimana ditentukan dengan pertimbangan individu yang dianggap paling memahami topik yang akan diteliti. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara dan alat bantu seperti buku catatan, telepon seluler, serta kamera (Fernandes, 2017). Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi tidak terstruktur (Sugiyono, 2018). Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles and Huberman kemudian analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis internal dan eksternal (Rangkuti, 2017), yang kemudian dilanjutkan dengan penerapan *Litmus Test* untuk menilai kelayakan, relevansi, dan efektivitas strategi yang diusulkan (Bryson, 2011). Strategi yang telah diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan analisis SWOT dan Uji Litmus kemudian akan disampaikan sebagai rekomendasi kebijakan kepada BPKAD Kabupaten Merauke (Juniarti et al., 2021). Penelitian ini dilakukan pada tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan 25 Januari 2025 di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan selama 10 hari kerja.

Peneliti melakukan wawancara dengan pejabat struktural di BPKAD Kabupaten Merauke untuk menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi BPKAD dalam mempertahankan opini WTP. Kemudian untuk memperkuat pernyataan oleh para narasumber, peneliti kemudian membandingkan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan hasil wawancara terkait faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi BPKAD, kemudian melakukan identifikasi dan pengelompokan dengan menggunakan analisis SWOT dimana peneliti memasukkan isu-isu yang telah teridentifikasi ke dalam matriks SWOT untuk kemudian menentukan isu-isu strategis yang akan di uji dari isu strategis SO, WO, ST, dan WT. setelah melakukan pengelompokan tersebut kemudian isu strategis di uji menggunakan *litmus test* untuk menguji seberapa layak dan penting isu strategis tersebut untuk di rekomendasikan kepada BPKAD Kabupaten Merauke.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis faktor internal dan faktor eksternal BPKAD Kabupaten Merauke dalam mempertahankan opini WTP dengan menggunakan teori dari Rangkuti tentang analisis SWOT yang terdapat 2 dimensi yaitu faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal yang terdiri dari ancaman dan peluang. Kemudian peneliti menggunakan *litmus test* menurut Bryson untuk menguji kelayakan isu strategis yang telah ditentukan untuk menentukan penting atau tidaknya isu strategis yang akan di rekomendasikan kepada BPKAD Kabupaten Merauke. Adapun pembahasannya dapat dilihat sebagai berikut.

#### 3.1. Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal strategi BPKAD Kabupaten Merauke

Penelitian ini mengukur faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan Matriks IFAS dan EFAS untuk mengetahui secara jelas apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh organisasi.

**Tabel 1. Matriks IFAS**

No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Bobot X Rating
<b>Kekuatan</b>				
1	Penerapan SAP sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010	0,1	4	0,4
2	Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	0,2	3	0,6
3	Adanya sistem pengendalian intern yang kuat	0,2	4	0,8
4	Adanya Program Pelatihan dan pengembangan SDM sebagai penyesuaian terhadap perubahan regulasi	0,1	3	0,3
<b>Kelemahan</b>				

1	Adanya temuan BPK yang belum ditindak lanjuti	0,1	2	0,2
2	Keterlambatan dalam pengumpulan laporan keuangan dari distrik di pedalaman	0,2	1	0,2
3	Perlu adanya peningkatan koordinasi antara BPKAD dan OPD maupun Distrik	0,1	3	0,3
Total		<b>1,0</b>		<b>2,8</b>

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

**Tabel 2. Matrik EFAS**

No	Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Bobot X Rating
<b>Peluang</b>				
1	Adanya potensi peningkatan PAD	0,3	4	1,2
2	Mendukung perencanaan keuangan yang lebih efektif dengan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu	0,1	4	0,4
3	Adanya potensi peningkatan investasi daerah	0,1	3	0,3
<b>Ancaman</b>				
1	Jumlah OPD yang banyak dan jarak yang berjauhan hingga pedalaman mengakibatkan terhambatnya koordinasi ke BPKAD	0,4	1	0,4
2	Adanya Perubahan Kebijakan	0,1	4	0,4
Total		<b>1,0</b>		<b>2,7</b>

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

Tabel 1. Matriks IFAS, menunjukkan total skor tertimbang sebesar 2,8 menunjukkan bahwa kekuatan internal BPKAD Kabupaten Merauke masih lebih dominan dibandingkan kelemahannya. Kekuatan utama terletak pada sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini didukung pernyataan Kepala BPKAD Kabupaten Merauke yang mengatakan, “Kami sudah menjalankan sistem pelaporan sesuai SAP dan selalu berupaya meningkatkan kualitas laporan.” Meski begitu, masih terdapat kelemahan seperti keterlambatan laporan dari distrik dan temuan BPK yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Seperti diakui Sekretaris BPKAD Kabupaten Merauke, “Beberapa OPD masih kurang responsif dalam menindaklanjuti temuan.” Secara keseluruhan, posisi internal BPKAD cukup kuat namun tetap perlu peningkatan koordinasi dan tindak lanjut atas kelemahan yang ada.

Tabel 2. hasil Matriks EFAS menunjukkan total skor 2,7, yang berarti BPKAD Kabupaten Merauke cukup mampu memanfaatkan peluang meskipun masih menghadapi beberapa tantangan. Peluang terbesar ada pada potensi peningkatan PAD, seperti dijelaskan oleh Kepala Bagian Akuntansi BPKAD Kabupaten Merauke “Kalau pendapatan daerah bisa terus ditingkatkan, kami bisa lebih leluasa dalam merancang anggaran.” Selain itu, dukungan terhadap perencanaan keuangan yang lebih baik juga menjadi kekuatan eksternal. Namun, ancaman tetap ada, terutama dari jumlah OPD yang tersebar di wilayah pedalaman yang menyulitkan koordinasi. Hal ini diungkapkan oleh

Kepala BPKAD Kabupaten Merauke “Kadang sulit koordinasi karena jarak OPD yang jauh dan akses yang terbatas.” Meski begitu, BPKAD dinilai masih berada dalam posisi yang cukup baik dan perlu terus beradaptasi terhadap dinamika kebijakan dan tantangan di lapangan.

Berdasarkan perhitungan diatas peneliti kemudian merumuskan isu-isu yang akan diuji antara lain Strategi SO memanfaatkan kekuatan sistem akuntansi pemerintah dan pengendalian intern yang baik untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara efektif tanpa perlu perubahan besar dalam regulasi atau penambahan staf. Strategi WO fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan agar dapat mengatasi kelemahan seperti keterlambatan laporan dari daerah terpencil dan kurangnya koordinasi, sekaligus memanfaatkan peluang perencanaan keuangan yang lebih baik dan potensi investasi. Strategi ST menggunakan keunggulan dalam pengendalian intern dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai aturan untuk menghadapi ancaman perubahan kebijakan pusat serta keterbatasan koordinasi antar unit kerja yang tersebar luas. Sedangkan strategi WT berupaya membangun platform komunikasi terpadu antara BPKAD, OPD, dan distrik guna memperbaiki koordinasi, mempercepat aliran informasi, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, terutama menghadapi tantangan jarak dan banyaknya unit kerja.

### 3.2. Strategi yang dapat diterapkan untuk mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan oleh BPKAD Kabupaten Merauke

Peneliti melakukan uji kelayakan pada isu-isu yang telah ditentukan dengan menggunakan *litmus test*. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut.

**Tabel 3. Rekapitulasi hasil *litmus test***

No	Isu Strategis	Total Skor	Tingkat Prioritas
1	Menerapkan SAP dan sistem pengendalian intern untuk mendukung peningkatan PAD	29	Cukup Strategis
2	Memanfaatkan program pelatihan SDM dan kepatuhan regulasi untuk perencanaan keuangan dan investasi daerah	30	Cukup Strategis
3	Meningkatkan koordinasi antara BPKAD dan OPD melalui pemanfaatan TI untuk peningkatan PAD dan perencanaan keuangan	29	Cukup Strategis
4	Menyusun sistem pelaporan keuangan berbasis digital adaptif terhadap daerah terpencil	31	Sangat Strategis
5	Memanfaatkan sistem pengendalian intern yang kuat untuk menghadapi perubahan kebijakan	26	Cukup Strategis
6	Menggunakan keunggulan laporan keuangan sesuai regulasi untuk mengatasi kesulitan koordinasi antar OPD	23	Cukup Strategis

7	Meningkatkan sistem monitoring dan tindak lanjut atas temuan BPK	31	Sangat Strategis
8	Membangun platform komunikasi terpadu antara BPKAD, OPD, dan Distrik	31	Sangat Strategis

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

Tabel 3. Rekapitulasi hasil *litmus test* diatas, menyatakan bahwa tiga hal paling penting yang perlu segera dilakukan adalah membuat sistem pelaporan keuangan digital yang bisa digunakan di daerah terpencil, meningkatkan pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari BPK, serta membangun komunikasi yang baik antara BPKAD, OPD, dan distrik. Ketiga hal ini memiliki nilai tertinggi dan dianggap sangat penting. Sedangkan hal lain seperti penerapan SAP, pelatihan SDM, dan pengendalian intern juga penting, tetapi tingkat prioritasnya sedikit lebih rendah.

### 3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil analisis faktor internal dan eksternal, penelitian ini menemukan bahwa BPKAD Kabupaten Merauke memiliki kekuatan utama dalam penerapan SAP, sistem pengendalian intern yang kuat, serta kepatuhan terhadap regulasi pelaporan keuangan. Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan yang perlu diperhatikan seperti keterlambatan pengumpulan laporan dari distrik terpencil dan belum optimalnya tindak lanjut atas temuan BPK. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum posisi internal BPKAD cukup kuat, namun tetap membutuhkan perbaikan dalam hal koordinasi dan pelaksanaan tindak lanjut audit. Dari sisi eksternal, peluang besar terlihat pada potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dukungan terhadap perencanaan keuangan yang lebih efektif. Akan tetapi, tantangan eksternal juga cukup signifikan, terutama karena kondisi geografis yang menyebabkan sulitnya koordinasi antara BPKAD dan OPD yang tersebar luas di wilayah pedalaman. Meskipun begitu, hasil analisis menunjukkan bahwa BPKAD masih dalam posisi yang cukup baik untuk memanfaatkan peluang yang ada, selama dapat beradaptasi dengan tantangan dan perubahan kebijakan yang terjadi. Selanjutnya, berdasarkan *litmus test* terhadap isu-isu strategis, ditemukan bahwa prioritas utama yang perlu segera diterapkan adalah pengembangan sistem pelaporan keuangan digital yang dapat menjangkau wilayah terpencil, peningkatan sistem monitoring dan tindak lanjut atas temuan BPK, serta pembangunan platform komunikasi terpadu antar unit kerja. Ketiga isu strategis ini dinilai sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan demi mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan. Sementara itu, isu lain seperti pelatihan SDM, pemanfaatan SAP, dan penguatan pengendalian intern tetap relevan untuk mendukung keberlanjutan kinerja keuangan daerah.

Penelitian ini menemukan bahwa strategi utama yang dapat diterapkan oleh BPKAD Kabupaten Merauke dalam mempertahankan opini WTP adalah pengembangan sistem pelaporan keuangan berbasis digital yang adaptif untuk wilayah terpencil, peningkatan sistem monitoring dan tindak lanjut atas temuan BPK serta pembangunan platform komunikasi terpadu antar unit kerja. Temuan ini memperkuat hasil penelitian

yang dilakukan oleh (Ningsih et al., 2022), yang menekankan pentingnya koordinasi lintas unit organisasi dan penguatan sistem pengelolaan keuangan sebagai faktor utama dalam mempertahankan opini WTP.

Namun, berbeda dengan temuan (Venaya, 2023), yang menyoroti peran Inspektorat sebagai aktor utama dalam mempertahankan opini WTP melalui pengawasan internal, penelitian ini lebih menekankan peran strategis BPKAD sebagai pelaksana utama kebijakan pengelolaan keuangan. Penelitian ini juga sejalan dengan (Budiyani et al., 2024), yang menegaskan bahwa pemahaman akuntansi, efektivitas sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi merupakan faktor penentu kualitas laporan keuangan. Dalam konteks tersebut, strategi pelatihan sumber daya manusia dan digitalisasi sistem pelaporan di BPKAD Merauke menjadi bukti konkret penerapan prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, strategi yang ditemukan dalam penelitian ini juga melengkapi temuan (Fazri, 2023), yang menekankan pentingnya penguatan landasan legalistik dan pelatihan teknis sebagai upaya menindaklanjuti temuan laporan keuangan daerah. Penelitian ini memperluas perspektif tersebut dengan mengintegrasikan pendekatan SWOT dan *Litmus Test* secara sistematis serta menyesuaikan strategi dengan kondisi geografis dan karakteristik daerah perbatasan, menjadikannya lebih adaptif dan aplikatif. Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini tidak hanya mendukung hasil penelitian terdahulu, tetapi juga memberikan kontribusi ilmiah baru melalui formulasi strategi yang kontekstual, integratif, dan berbasis pada kondisi nyata di lapangan, khususnya dalam menghadapi tantangan koordinasi dan infrastruktur di daerah terpencil.

### **3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (Opsional)**

Penelitian ini juga menemukan bahwa peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan masih menjadi strategi yang cukup potensial, pemanfaatan teknologi informasi penting untuk mengatasi hambatan geografis dan meningkatkan efisiensi koordinasi, serta perlunya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan regulasi yang dapat menjadi tantangan sekaligus peluang. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa selain fokus pada sistem dan koordinasi, BPKAD juga perlu memperkuat aspek sumber daya manusia dan infrastruktur digital untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis internal dan eksternal, BPKAD Kabupaten Merauke dinilai memiliki kekuatan yang cukup baik, terutama dalam penerapan standar akuntansi, pengendalian intern, dan pelatihan SDM, meskipun masih ada kelemahan seperti temuan audit yang belum ditindaklanjuti dan kurangnya koordinasi antar OPD. Dari sisi eksternal, tersedia peluang seperti peningkatan PAD dan investasi, namun juga ada ancaman seperti perubahan kebijakan dan tantangan geografis. Untuk menghadapi hal tersebut, BPKAD memprioritaskan tiga strategi utama: digitalisasi pelaporan keuangan di daerah terpencil, tindak lanjut temuan BPK, dan pembangunan platform komunikasi terpadu. Ketiga strategi ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan

transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah agar opini WTP dapat terus dipertahankan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan di satu instansi yaitu BPKAD Kabupaten Merauke, menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat subjektif, serta terbatasnya data dan waktu yang dapat memengaruhi kelengkapan informasi yang diperoleh.

**Arah Masa Depan Penelitian (Future Work).** Penelitian ini dirasa masih belum menganalisis lebih rinci, maka dari itu peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan membandingkan strategi antar daerah dan menggunakan data kuantitatif agar hasilnya lebih luas dan akurat dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala BPKAD Kabupaten Merauke beserta jajarannya yang telah mengizinkan dan membimbing peneliti dalam melakukan penelitian di BPKAD Kabupaten Merauke, serta kepada semua pihak yang turut membantu dalam pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, B. (2013). *Akuntansi Sektor Publik Konsep & Teori*. CV. Bumi Metro Raya. IPDN.
- Bryson, J. M. (2011). *Strategic Planning For Public and NonProfit Organizations* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Budiyani, E. N., Sinarasri, A., & Kristiana, I. (2024). Factors Affecting the Quality of Local Government Financial Statements. *Accounting Analysis Journal*, 9(1), 53–59. <https://doi.org/10.15294/aaj.v9i1.23123>
- Fazri, M. AL. (2023). *Strategi Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan*.
- Fernandes, S. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta, cv. IPDN.
- Jung, H. (2024). Relocation of public institutions and local public finance: Evidence from South Korea. *International Review of Administrative Sciences*, 90(4). <https://doi.org/10.1177/00208523241238214>
- Juniarti, J., Simanjaya, C., & Soesetyo, Z. E. (2021). Differentiation Strategy and Cost Leadership Strategy: Their Contribution to Achieving Sustainable Financial Performance. *Digital Economy and New Value Creation*, 197–219. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-07265-9\\_16](https://doi.org/10.1007/978-3-031-07265-9_16)
- Lin, B., Ye, F., Zhang, Y., & Tsang, I. W. (2021). *Reasonable Effectiveness of Random Weighting: A Litmus Test for Multi-Task Learning*. 1–18. <http://arxiv.org/abs/2111.10603>
- Ningsih, N. S., Nur, T., & Meigawati, D. (2022). Strategi Pengelolaan Keuangan Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 221. <https://doi.org/10.25157/dak.v9i2.8084>

- Pratiwi, A., Yunitasari, D., Wilantari, R. N., & Jurnal Humaniora Vol 5 No 2. (2021). Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. In *Oktober* (Vol. 5, Issue 2). <http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora>
- Rangkuti, F. (2017). *Teknik Membedah Kasus Bisnis : ANALISIS SWOT*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sinurat, M. (2015). *Reviu : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Cet. 1). Pustaka Rahmat. IPDN.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Cet.28). Bandung:Alfabeta.
- Sumaryana, A., Miftah, A. Z., Widianingsih, I., & Karlina, N. (2025). Turning over a new leaf: Post-Covid infrastructure development planning and financing strategies in the organizational environment of Bandung City. *Regional Science Policy & Practice*, 17(3), 100170. <https://doi.org/10.1016/j.rspp.2024.100170>
- Suwanda, D. (2013). *Strategi Mendapatkan Opini WTP : Laporan Keuangan Pemda* (Cet. 1). PPM MANAJEMEN.IPDN.
- Tanjung, A. H., Salam, S., Rusdi, J. F., Ermawati, Y., Novianty, I., Hendaris, R. B., & Apriliawati, Y. (2021). Flypaper effect assessment methods in the expansion of regional autonomy. *MethodsX*, 8, 101387. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2021.101387>
- Venaya, E. (2023). *Strategi Inspektorat Dalam Membantu Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat*.
- Wasistiono, S., Sartika, I., & Ruhana, F. (2024). *Metode Ilmu Pemerintahan (MPIP)* (1st ed.). Bumi Aksara. IPDN.

